



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUSNADI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 143389

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 668.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/200 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 401 m2/225 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/36 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
4. Tanah Seluas 1090 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 11760 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 184.051.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1300 G F601 RM GMMF JJ Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA YAMAHA/T 105 ERD VEGA R Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA/AFP12W21C08 MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B65 AEROX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000



5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
28.551.000
6. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.762.060

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 891.313.060

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 891.313.060

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.